

IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA STUDI KASUS KECAMATAN AMUNTAI UTARA (UPT PUSKESMAS SUNGAI TURAK DAN GUNTUNG)

Wahiddinor¹, Jumaidi², M. Arsyad³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: waahiidd7@gmail.com

ABSTRAK

Secara nasional angka kematian ibu di Indonesia mengalami peningkatan, terdapat permasalahan disebabkan seperti kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis yang ada di posyandu, serta kurangnya pengawasan terkait kegiatan posyandu yang ada di puskesmas. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi program posyandu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada: aspek 1) Kemampuan Organisasi dilihat pada indikator kemampuan teknis baik, Indikator SOP baik. 2) Informasi dilihat pada indikator informasi atau sosialisasi baik. 3) Dukungan dilihat pada indikator sikap masyarakat baik. 4) Pembagian potensi dilihat pada indikator pembagian wewenang baik, dan indikator komitmen. baik, Faktor pendukung adanya koordinasi yang bagus antara Dinas Kesehatan dengan UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung. Faktor penghambat terdiri dari: Kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan terhadap sarana prasarana dan tenaga medis yang ada di posyandu dan kegiatan di posyandu. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan: Kepada Kepala Dinas Hendaknya melakukan evaluasi. Kepada UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung hendaknya memberikan motivasi agar masyarakat selalu mengikuti posyandu dan pemberian motivasi kepada masyarakat untuk rajin posyandu.

Kata Kunci : Implementasi, Puskesmas, Posyandu

ABSTRACT

Nationally, the maternal mortality rate in Indonesia has increased, there are problems caused by the lack of supervision by the North Hulu Sungai District Health Service regarding the availability of infrastructure and medical personnel at posyandu, as well as a lack of supervision regarding posyandu activities at community health centers. The aim of the research is to determine the implementation and factors that influence the posyandu program at the Hulu Sungai Utara District Health Service. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The research results showed good. This can be seen in: aspects 1) Organizational capability is seen in indicators of good technical capability, good SOP indicators. 2) Information is seen in indicators of good information or socialization. 3) Support is seen in indicators of good community attitudes. 4) The distribution of potential is seen in indicators of good division of authority and commitment indicators. good, the supporting factor is good coordination between the Health Service and the UPT of the Sungai Turak and Guntung Community Health Centers. Inhibiting factors consist of: Lack of supervision by the Health Service regarding the infrastructure and medical personnel at the posyandu and activities at the posyandu. Based on this, it is recommended: The Head of Service should carry out an evaluation. The UPT of the Sungai Turak and Guntung Health Centers should provide motivation so that the community always attends the posyandu and provide motivation for the community to be diligent in the posyandu.

Keywords: Implementation, Community Health Center, Posyandu

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini perlu dilakukan karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Pembangunan dalam bidang kesehatan di arahkan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi penduduk yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan dengan prioritas kesehatan pada bayi dan kesehatan ibu hamil.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara nasional angka kematian ibu di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan beberapa hal berdasarkan hasil sample Registration System yang menyebutkan bahwa : hipertensi (33,07 %), pendarahan obstetri (27,03%). Sedangkan berdasarkan data Maternal perinatal Death Notification (MPDN) tiga penyebab teratas kematian ibu adalah Eklamsi (37,1 %), pendarahan (27,3%), infeksi (10,4%) dengan tempat lokasi kematian tertinggi adalah Rumah Sakit (84%).(Sumber dari GPPI 2023) Kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun.

Angka ini digunakan sebagai acuan untuk menilai baikburuknya kondisi seperti ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Berdasarkan hasil Sample Registraton System (SRS) Litbangkes Tahun 2022 tiga penyebab utama kematian bayi terbanyak adalah komplikasi kejadian intrapartum (28.3%), gangguan respiratori dan kardiovaskuler (21,3%) dan Bayi Berat Badan Lahir Rendah & Prematur (19%). Sedangkan berdasarkan data Maternal Pennatal Death Nofcicaton (MPDN) tanggal 21 September 2021, tiga penyebab teratas kematian bayi adalah BBLR (29.21%), Asfiksia (27.44%), Infeksi (5.4%) dengan tempat lokasi kematian tertingginya adalah di Rumah Sakit (92,41 %). Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan kesehatan anak, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas.

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997, berpengaruh terhadap kinerja Posyandu yang turun secara bermakna. Dampaknya terlihat pada menurunnya status gizi dan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kelompok rentan, yakni bayi, anak balita dan ibu

hamil serta ibu menyusui. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah bijak, dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Revitalisasi Posyandu, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu. Secara garis besar tujuan Revitalisasi Posyandu adalah (1) terselenggaranya kegiatan Posyandu secara rutin dan berkesinambungan; (2) tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau penyegaran, dan (3) tercapainya pementapan kelembagaan Posyandu. Secara menyeluruh, kegiatan Revitalisasi Posyandu tertuang dalam Surat Edaran Menteri tersebut di atas. Sasaran Revitalisasi Posyandu adalah semua Posyandu di seluruh Indonesia. Namun mengingat sumber daya yang terbatas, maka sasaran Revitalisasi Posyandu diutamakan pada Posyandu yang sudah tidak aktif atau yang berstrata rendah (Posyandu Pratama dan Posyandu Madya) dan Posyandu yang berada di daerah yang sebagian besar penduduknya tergolong miskin. Meskipun prioritas Posyandu yang akan direvitalisasi telah ditetapkan seperti tersebut di atas, upaya pembinaan terhadap Posyandu lainnya yang sudah mapan terus dilanjutkan.

Untuk memantapkan upaya dimaksud dan dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu yang memerlukan peran serta pemerintah daerah dan lintas sektor, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program pembinaan Posyandu, petugas Puskesmas dan stakeholder lainnya berkewajiban untuk meningkatkan pemahamannya tentang Posyandu. Namun hasil observasi implementasi program Posyandu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Kecamatan Amuntai Utara (UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih terdapat permasalahan. Permasalahan ini terus terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut ini:

1. Kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis yang ada di posyandu. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Posyandu yang menyatakan bahwa: Dinas Kesehatan, berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan seperti pengadaan alat timbangan serta alat alat posyandu lainnya dan dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.(Sumber: Data Investaris Fasilitas Pelaksanaan Posyandu dari Pegawai UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung).
2. Kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kegiatan posyandu yang ada di puskesmas. Rata-rata posyandu yang ada masih berada di strata posyandu madya. Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali pertahun, 6 dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA (Kesehatan, Ibu dan Anak), Gizi dan Imunisasi) masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Iniberarti, kelestarian kegiatan posyandu sudah baik tetapi cakupannya masih rendah, dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

METODE

Lokasi penelitian ini, akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui Purposive Sampling. Informan berjumlah 10 orang. Setelah data

terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan member check.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian menggunakan Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) sebagai berikut :

1. Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi.

a. Kemampuan Teknis

Kemampuan Teknis adalah kapasitas pelaksana untuk melaksanakan berbagai tugas dalam mencapai tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan indikator kemampuan teknis baik, dilihat dari kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan Posyandu untuk masyarakat terutama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah tercapai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: salah satunya kemampuan teknis,

b. Koordinasi antar instansi terkait

Koordinasi antar instansi terkait adalah fondasi utama untuk kesinambungan dan keberhasilan dalam penanganan implementasi program posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator koordinasi baik, Dinas Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan posyandu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah sesuatu pedoman dalam melakukan kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator SOP baik, karena SOP yang ada selama dijalankan sesuai dengan pelaksanaan dari setiap puskesmas yang ada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOP" (Standard Operating Procedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi

Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

a. Penyaluran Informasi/Sosialisasi

Penyaluran Informasi yang efektif dan sosialisasi yang baik menjadi pondasi utama kesadaran dan pemahaman bersama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan dari program posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator penyaluran informasi atau sosialisasi baik, peran aktif dari UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung dalam mewujudkan posyandu lebih optimal yaitu dengan melaksanakan monitoring dan kunjungan secara langsung ke desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) mengatakan bahwa: Informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang baik antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

b. Cara Menyampaikan Informasi

Cara menyampaikan informasi sangat penting dilakukan dengan jelas, ringkas, dan relevan agar dapat diterima dengan baik oleh audiens.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator penyampaian informasi cukup baik, penyampaian informasi sosialisasi langsung dan arahan langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pemantau utama terus menjalankan program kegiatan dengan menyampaikan informasi kepada puskesmas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) mengatakan bahwa: Informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang baik antara organisasi.

3. Dukungan

Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka

a. Sikap masyarakat

Sikap masyarakat memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika sosial. Kesadaran, toleransi, dan partisipasi aktif menjadi elemen – elemen penting dalam membentuk sikap positif yang mendukung kesejahteraan bersama dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator sikap masyarakat baik, hal ini dilihat dari masyarakat selalu hadir dalam kegiatan posyandu menerima serta mematuhi arahan dari pelaksanaan program posyandu mereka diberi susu dan PMT merasa senang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) mengatakan bahwa: Dukungan yang baik terhadap objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka juga dalam pelaksanaan posyandu patuh dalam kegiatan yang ada.

b. Kepatuhan masyarakat

Kepatuhan masyarakat terhadap norma, hukum dan etika adalah landasan bagi tatanan sosial yang harmonis, Peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan memperkuat fondasi kesejahteraan bersama, menciptakan lingkungan yang aman, dan mendorong perkembangan positif dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan masyarakat baik, karena dilihat orang tua memeriksa tumbuh kembang anaknya ke posyandu terdekat baik dari meja 1 sampai ke 5 dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) mengatakan bahwa: Dukungan; Dukungan yang baik terhadap objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka juga dalam pelaksanaan posyandu patuh dalam kegiatan yang ada.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian implementasi Kebijakan Kemampuan Dukungan Organisasi Informasi Pembagian Potensi tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

a. Pembagian wewenang

Pembagian wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana program dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan indikator pembagian wewenang sudah baik, Kepala Puskesmas di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pemantauan disetiap pelaksanaan dan wajib melakukan kegiatan monitoring

serta evaluasi di setiap kegiatan dan kunjungan kemudian melaporkan kegiatan terkait pelaksanaan posyandu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) mengatakan bahwa: Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggung jawab disesuaikan dengan pembagian implementasi kebijakan

b. Komitmen

Komitmen adalah fondasi keberhasilan dalam pelaksanaan program posyandu karena komitmen merupakan kunci dalam berjalannya pelaksanaan dengan baik sesuai tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen baik, dilihat dari Jadwal wajib kepala Puskesmas melapor dan bertanggung jawabkan hasil posyandu kepada Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara serta dilihat dari pelaksanaan posyandu yang berjalan dengan semestinya..

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Warwic dalam Yulianto Kadji (2015:70-72) mengatakan bahwa: dukungan organisasi informasi pembagian potensi tugas seperti pembatasan-pembatasan yang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Posyandu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Kecamatan Amuntai Utara (UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung) sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a) Adanya koordinasi yang bagus antara Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung dalam melaksanakan program posyandu
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi yang bagus antara Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung, peran aktif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan posyandu lebih optimal yaitu dengan melaksanakan monitoring dan kunjungan secara langsung ke puskesmas.

2. Faktor penghambat.

- a) Kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap sarana prasarana dan tenaga medis dalam pelaksanaan program posyandu.
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa Kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap sarana prasarana dan tenaga medis pada posyandu yang dapat dilihat dari sarana prasarana yang kurang memadai.
- b) Kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap program-program posyandu yang ada di puskesmas
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa Kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap kegiatan posyandu yang hanya terlaksana 50%

SIMPULAN

Implementasi program Posyandu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Kecamatan Amuntai Utara (UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung) Baik hal tersebut dapat dilihat pada: 1) Kemampuan Organisasi dilihat pada indikator kemampuan teknis baik, dan koordinasi antar instansi baik, Dinas Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan posyandu. Kegiatan ini merupakan langkah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan dalam menyelenggarakan program posyandu lebih optimal, dan indikator SOP baik, karena SOP yang ada selama dijalankan sesuai dengan pelaksanaan dari setiap puskesmas yang ada. 2) Informasi dilihat pada indikator informasi atau sosialisasi baik, penyampaian informasi sosialisasi langsung dan arahan langsung dari Dinas Kesehatan dan indikator penyampaian informasi baik, 107 109 3) Dukungan dilihat pada indikator sikap masyarakat baik, hal ini dilihat dari masyarakat menerima serta mematuhi arahan dari

pelaksanaan program. 4) Pembagian potensi dilihat pada indikator pembagian wewenang baik, dan indikator komitmen baik, dilihat dari Jadwal wajib kepala Puskesmas melapor dan mempertanggung jawabkan hasil posyandu kepada Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor penghambat dan pendukung. Faktor pendukung adanya koordinasi yang bagus antara Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan UPT Puskesmas Sungai Turak dan Guntung dalam pelaksanaan program posyandu, peran aktif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mewujudkan program posyandu lebih optimal yaitu dengan melaksanakan pemberian alat timbangan, buku KIA, dan vitamin serta obat tambah darah. Faktor penghambat terdiri dari: Kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap sarana prasarana dan tenaga medis yang ada di posyandu dan kegiatan di posyandu..

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2014) *Kebijakan Pengantar Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2020) 'Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta.(2), p. 51.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Hasbi Imanuddin, Hartoto and Maharani Dyah (2021) 'Kebijakan Publik'. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Mutiarin, Dyah & Arif Zaenudin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*,

Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

Putera, P.A Anggara, S. (2015a) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Anggara, S. (2015b) 'Metode Penelitian Administrasi', 53(9), pp. 1689–1699.

Anonim (2014) 'P Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.', *Peraturan Menteri*,. (2016) 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten

STIA AMUNTAI (2022) 'Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik', *Pedoman Penyusunan Skripsi*.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.